

Fadli Zon: Kolaborasi dan kerja sama internasional mutlak untuk berantas korupsi



London—

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menegaskan bahwa kolaborasi dan kerja sama internasional mutlak diperlukan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kerja sama tersebut semestinya pula bersifat komprehensif dan tidak terbatas pada penegakan hukum semata.

“Ada beragam pihak yang dapat mendorong dan membantu upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Masyarakat sipil misalnya, dapat memperkuat sistem *whistleblower* dan mekanisme untuk melindungi sang *whistleblower*-nya. Kolaborasi data terbuka, juga dapat mendorong pengawasan oleh publik semakin kuat,” jelas Fadli yang juga Presiden Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC), Rabu, (11/5).

Dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan DPR RI dan Presiden GOPAC, Fadli Zon mendapatkan undangan untuk menghadiri acara KTT Anti-Korupsi (*UK Anti-Corruption Summit*) yang akan digelar Kamis (12/5), di Lancaster House, London. Sehari sebelumnya, Fadli juga mendapatkan kesempatan istimewa untuk memenuhi undangan mengikuti *Tackling Corruption Together*, sebuah konferensi bagi masyarakat sipil, pemerintah dan juga kalangan bisnis, yang digelar oleh *Commonwealth Secretariat*, di Marlborough House, London.

Dalam konferensi tersebut, beragam komunitas masyarakat sipil internasional, bisnis, dan juga pemerintah serta akademisi hadir untuk bertukar pandangan mengenai upaya kolaborasi pemberantasan korupsi ke depan. Mereka juga menjadi agenda penting dalam penyelenggaraan KTT Anti-Korupsi di London tersebut. Sejumlah pembicara dari organisasi internasional seperti OECD, UN Office on Drugs and Crime (UNODC), Kantor Presiden Meksiko, Presiden Nigeria,

hingga LSM Internasional seperti *Transparency Internasional*, *Global Witness*, *Oxfam*, maupun kalangan bisnis seperti *Vodafone*, *Barclays Bank*, terlibat dalam konferensi tersebut.

Salah satu sorotan dalam konferensi tersebut adalah mengenai pentingnya perusahaan mengekspose penerima manfaat utama (*beneficial ownership*) dari beragam aktivitas bisnis yang ada. Ini untuk menghindari keberadaan perusahaan-perusahaan cangkang yang hanya dapat menjadi sarana penghindaran pajak maupun pencucian uang. Kasus Panama Papers menegaskan pentingnya rezim *public registry* atas hal tersebut.

“Dalam kesempatan tersebut, GOPAC berdiskusi dengan sejumlah kalangan masyarakat sipil internasional seperti TI hingga *Not In My Country*, sebuah LSM internasional yang menangani korupsi melalui aplikasi berbasis teknologi. Kami berbicara mengenai kemungkinan kolaborasi ke depan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tandasnya.

Secara spesifik, Direktur Eksekutif *Not In My Country*, Roey B Rosenblith, memiliki ketertarikan untuk berkolaborasi untuk penggunaan dunia maya dalam pengungkapan kasus korupsi maupun dalam membangun skema *whistleblowing* di Indonesia. Indonesia menurutnya memiliki pengguna dunia maya yang sangat signifikan dan besar dan dapat menjadi kekuatan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Not In My Country* merintis aplikasi *crowd source anti-corruption* di sejumlah negara.



Fadli Zon menyambut baik ketertarikan *Not In My Country*, dan terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai prospek kerja sama yang dapat didorong. “Kami tertarik untuk mengembangkan platform serupa bagi kalangan legislator. GOPAC Indonesia dapat diperkenalkan terlebih dahulu terhadap platform tersebut,” papar dia.

Konferensi itu menghasilkan Manifesto Anti-Korupsi yang akan disampaikan pada KTT Anti-Korupsi, Kamis (12/5). Sementara itu, sebelum penyelenggaraan KTT, pertemuan di level SOM (*Senior Officers Meeting*) membahas mengenai hasil dari KTT tersebut yakni Deklarasi dan sebuah *Communique*, Rabu (11/5).

Inggris menjadi tuan rumah dari KTT tersebut dan akan membawa sedikitnya empat usulan (*concept note*) sejumlah inovasi baru dalam pemberantasan korupsi di antaranya adalah pembentukan *International Anti-Corruption Coordination Center for Law Enforcement (IACCC)*, sebuah pusat yang akan memperkuat koordinasi penanganan hukum lintasjurisdiksi. Beragam usulan tersebut menjadi pembahasan lebih lanjut dalam KTT di tengah ramainya isu publik mengenai Panama Papers. (BKSAP 2016)

DPR tegaskan kedaulatan Indonesia



London—

DPR menegaskan kedaulatan Indonesia dengan menolak upaya internasionalisasi Papua sebagai bagian propaganda yang telah dilakukan oleh Benny Wenda, melalui *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP), dan didukung oleh beberapa anggota parlemen dari Inggris.

Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, saat menemui Lord Harries of Pentregarth, anggota House of Lords, di Gedung Parlemen Inggris, Rabu (11/5). Lord Harries adalah satu dari sejumlah anggota Parlemen Inggris yang tergabung dalam *International Parliamentarians for West Papua* (IPWP).

Bersama dengan Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan, Fadli Zon juga menyampaikan surat terbuka baik kepada Lord Harries dan juga kepada Jeremy Corbyn, petinggi Partai Buruh yang juga tergabung dalam IPWP. Fadli menolak dengan keras pernyataan Corbyn dan juga Lord Harries yang disampaikan dalam pertemuan IPWP, Selasa, (3/5) lalu. “Saya memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, berimbang dan komprehensif mengenai situasi terakhir di Papua,” tukasnya.

Pada pertemuan terakhir IPWP yang melibatkan Benny Wenda tersebut, Corbyn dan juga Harries menyerukan pengakuan internasional akan Papua.

Luhut pada kesempatan tersebut juga menegaskan hal serupa terkait kedaulatan Indonesia. Luhut juga berharap agar Harries dapat menerima informasi secara komprehensif terkait Papua.

Beberapa kemajuan dan progress terkait Papua telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui sejumlah program.

Dalam surat terbuka Fadli juga memaparkan dengan gamblang beragam program khusus yang dikurcurkan untuk Papua. Dalam hal dana pembangunan yakni Dana Otsus dan Infrastruktur, Papua yang memiliki status otonomi khusus tersebut, telah menerima sedikitnya Rp 148,3 trilliun (2011-2015). Pada 2016, dana senilai Rp 62,1 triliun didedikasikan khusus untuk pembangunan Papua. Fokus pembangunan saat ini adalah infrastruktur melalui jalan Trans-Papua, peningkatan bangunan bandara dan lain sebagainya.

“Pendekatan tidak hanya dengan dana. Indonesia juga tengah menyiapkan beasiswa afirmatif khusus rakyat Papua untuk belajar di universitas-universitas terbaik di dunia. Keterwakilan Papua dalam pengambilan kebijakan semakin banyak. Gubernur, Kapolda dan bahkan Kapten Tim Nasional Indonesia berasal dari Papua,” urainya.

Pada kesempatan tersebut, Indonesia juga mengundang Harries ke Papua untuk melihat situasi lapangan. Harries mengakui ada perkembangan pembangunan di Papua, khususnya dalam rezim Pemerintahan saat ini. Harries menyambut baik usulan berkunjung ke Papua, namun, menyatakan belum bisa memenuhi dengan sejumlah pertimbangan keluarga.

“Saya juga menegaskan agar Harries dan Corbyn serta para anggota Parlemen Inggris untuk mendukung kedaulatan Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana kami menghormati secara penuh integritas wilayah dan kedaulatan Inggris,” pungkas Fadli. (BKSAP 2016)